

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 3*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997.

Abdul Rahmad Budiono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Banyumedia Publishing, Malang, 2005.

Achmad Ali, *Menang dalam Perkara Perdata*, Umitoha Ukhuwah Grafika, Ujung Pandang, 1997.

Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Akhsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Kharisma Ilmu, Bogor, 2007.

Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014.

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012.

Andi Hamzah, *Delik-Delik Tersebar di Luar KUHP dengan Komentar*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.

_____, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.

_____, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jasa Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Chaerudin, dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Denny Indrayana, *Negara Antara Ada dan Tiada: Reformasi Hukum Ketatanegaraan*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2008.
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK: Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 Versi UU Nomor 30 Tahun 2002*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- _____, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Firman Wijaya, *Peradilan Korupsi: Teori dan Praktik*, Maharani Press, Jakarta, 2009.
- Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- IGM Nurdjana, *Korupsi Dalam Praktek Bisnis (Pemberdayaan Penegak Hukum, Program Aksi dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- _____, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, Transparency International Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003.

- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- M. Abdul Kholiq AF, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, Yogyakarta, 2002.
- M. Hamdan, *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005.
- Mahmuddin Muslim, *Jalan Panjang Menuju KPTPK*, Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GeRAK) Indonesia, Jakarta, 2004.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Moh. Khasan, *Reformulasi Teori Hukuman Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam*, IAIN Walisongo, Semarang, 2011.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001.
- Muntaha, *Penerapan Asas Oportunitas dalam Hukum Pidana di Indonesia*, GENTA Publishing, Yogyakarta, 2014.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2005.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- _____, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Pathorang Halim, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi*, Total Media, Yogyakarta, 2013.

Paulus Efendi Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT), *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Penerjemah H. Zaini Dahlan, UII Press, Yogyakarta, 1999.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.

_____, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009.

Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Pustaka Setia, Bandung, 2010.

S.F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara I*, FH UII Press, Yogyakarta, 2012.

Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2004.

_____, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia (Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin)*, GENTA Publishing, Yogyakarta, 2009.

Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum: Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.

_____, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990.

Sutan Reny Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004.

Suyatno, *Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005.

Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 2003.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989.

Yunus Husein, *Negeri Sang Pencuci Uang*, Pustaka Juanda Tiga Lima, Jakarta, 2008.

B. Jurnal dan Makalah

Abu Hapsin, *Pidana Mati Bagi Koruptor*, dalam *Justisia*, edisi 37 Tahun XXII 2011.

Eddy O.S Hiariej, *Asas Legalitas dan Perkembangannya dalam Hukum Pidana*, Makalah disampaikan dalam acara Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi, Yogyakarta, 23-27 Februari 2014.

Jon S.T. Quah, *Paper presented at the Asia-Pacific Governance Institute's Conference on "The Many Faces of Public Management Reform in the Asia-Pacific" in Bangkok, Thailand July 7-9, 2008.*

M. Abdul Kholiq AF, *Eksistensi KPK dalam Peradilan Korupsi di Indonesia*, Artikel pada Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Edisi No. 26 Vol. 11, 2004.

M. Ali Zaidan, *Asas Legalitas dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Yuridis Hukum Pidana, Edisi No. 3, Vol. 2, Juli 2004.

Otto Cornelis Kaligis, *Korupsi Sebagai Tindakan Kriminal Yang Harus Diberantas (Karakter dan Praktek Hukum di Indonesia)*, Jurnal Equality, Vol. 11, No. 2, Agustus 2006.

Yunus Husein, *PPATK: Tugas, Wewenang, dan Perannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Hukum Bisnis, Edisi No. 3 Vol. 22, 2003.

C. Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Peradilan

Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi.

Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat Nomor PRT/PEPERPU/013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi dan Pemilikan Harta Benda.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 24 Tahun 1960 Pengusutan, Penuntutan, Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Perppu Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang.

Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung.

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 77/PUU-XII/2014 tentang Permohonan Pengujian UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap UUD Negara RI Tahun 1945.

Risalah Sidang Pengujian UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap UUD Negara RI Tahun 1945 pada Tanggal 9 Oktober 2014.

D. Data Elektronik

<http://www.jpnn.com/read/2014/02/15/216728/318-Kepala-Daerah-Terjerat-Korupsi->, diakses pada Tanggal 5 Februari 2015, Pukul 09.30 WIB.

Mutatis mutandis berasal dari bahasa Latin yang artinya kurang lebih adalah "perubahan yang penting telah dilakukan". Istilah ini digunakan pada saat membandingkan dua situasi dengan variabel yang berbeda. http://id.wikipedia.org/wiki/Mutatis_mutandis, diakses pada Tanggal 11 Februari 2015, Pukul 11.00 WIB.

<http://nasional.sindonews.com/read/761836/13/putusan-inkracht-wa-ode-jadi-yurisprudensi-kpk-1373983393>, diakses pada Tanggal 12 Februari 2015, Pukul 16.30 WIB.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Jurisprudensi>, diakses pada Tanggal 12 Februari 2015, Pukul 16.35 WIB.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol8693/jaksa-dan-hakim-spesialis-korupsi-sudah-diseleksi-secara-ketat>, diakses pada Tanggal 14 Februari 2015, Pukul 09.47 WIB.

<http://www.suaramerdeka.com/harian/0711/16/nas09.htm>, diakses pada Tanggal 14 Februari 2015, Pukul 09.55 WIB.

<http://news.detik.com/read/2013/07/15/114202/2302716/10/dissenting-opinion-2-hakim-nilai-jaksa-kpk-tak-berwenang-menuntut-tpu>, diakses pada Tanggal 23 Februari 2015, Pukul 18.43 WIB.

<http://www.merdeka.com/peristiwa/2-hakim-tentang-kpk-tuntut-pencucian-uang-eks-kepala-bappebti.html>, diakses pada Tanggal 23 Februari 2015, Pukul 18.43 WIB.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5423862088dc9/divonis-8-tahun-penjara--anas-minta-waktu-istikharah>, diakses pada Tanggal 23 Februari 2015, Pukul 19.05 WIB.

<http://otentiknews.com/hakim-beda-pendapat-dalam-kasus-anas/>, diakses pada Tanggal 23 Februari 2015, Pukul 18.50 WIB.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f4b68a5a9f2d/kpk-berjanji-tahan-semua-tersangka>, diakses pada Tanggal 23 Februari 2015, Pukul 19.19 WIB.

<http://pesantren.uui.ac.id/content/view/33/52/1/1/>, diakses pada Tanggal 23 Februari 2015, Pukul 19.31 WIB.

http://elearning.ppatk.go.id/pluginfile.php/125/mod_page/content/2/Mod%201%20-%20Bag%202%20-%20Tipologi%20Pencucian%20Uang.pdf, diakses pada Tanggal 5 Maret 2015, Pukul 22.12 WIB.